PANITIA SARASEHAN
"PROSPEK EKONOMI KERAKYATAN
DI JAWA TIMUR - 2007"
PERHIMPUNAN PUSTAKA LEWI (PPL)
Jl. Cipta Menanggal 1 Blok 6-A1, Surabaya (031) 8298128 – 70829984

RESUME

Fakta Kegiatan

Pelaksanaan

Tempat	:	Rumah Makan "Taman Sari Indah" Jl. Taman Apsari No. 3-5, Surabaya.
Hari / Tanggal	:	Sabtu, 27 Januari 2006.
Waktu	:	09.30 – 13.15 WIB.
Keynote Speaker	:	Pdt. Drs. Ec. M. Sudi Dharma M.Th.
Moderator	:	Santo A. Vormen & Hizkia Y.S. Polimpung.

Rundown Acara

- Pembukaan oleh Ketua Panitia.
- Ibadah singkat oleh Pdt. Elia.
- Sambutan Ketua Panitia & ketua Perhimpunan Pustaka Lewi.
- Paparan *Keynote Speaker.*
- Paparan awal moderator.
- Diskusi.
- Makan siang & istirahat.
- Pembacaan rumusan / resume sementara hasil diskusi oleh Moderator.
- Umpan balik.
- Penutupan *(oleh moderator & Doa oleh Pdt. Sinwo)*

Peserta : 30 Orang *(–selain panitia–)*

1. *Dwi Cahyono*
2. *M. Anwar S.*
3. *Meylia*
4. *Daniel Lukas Rorong*
5. *Poedjiono*
6. *Mathilda*
7. *Ajeng Ayu W.*
8. *Natalia*
9. *Pdt. Frans M.*
10. *Ir. Thomas Aden M.Eng*
11. *Wien L. T.*
12. *Suliono*
13. *Yovie W.*
14. *Sinwo Susanto, MM, MA*
15. *Christofel*
16. *Jhon Kahaluge*
17. *Veronica*
18. *Pratiwi*
19. *Pdt. Elia B. D.*
20. *Juanda*
21. *Onny D.*
22. *Hendra*
23. *Albert*
24. *Stefanny*
25. *Santi*
26. *David L. Rehyarr*
27. *I Dwi Tjahyono*
28. *Pdt. Ch. Simamora, MA*
29. *Kornelis P. W.*
30. *Pahala H.*

"Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi penjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan" (Ulangan 15 : 7-8)

Pendahuluan

Syukur kami naikan ke hadirat Yesus Kristus, Khalik pencipta Bumi, Allah yang Maha Kuasa, atas berkat dan pertolongan-Nya sajalah "Sarasehan Perhimpunan Pustaka Lewi : Prospek Ekonomi Kerakyatan Jawa Timur 2007" dapat terlaksana dengan baik. Kendati didapati kendala-kendala baik teknis, seperti keterbatasan dana dan tenaga untuk mengorganisir acara, maupun substansial, seperti perbedaan persepsi mengenai konsep "ekonomi kerakyatan" di kalangan peserta. Namun syukurlah hal itu tidak menyurutkan langkah baik panitia dan peserta untuk tetap ambil bagian dalam sarasehan ini.

Sebagaimana diungkapkan oleh media dan pakar-pakar ekonomi nasional bahwa perekonomian Indonesia cukup berprestasi, pemerintah bersama segenap jajarannya tidak seharusnya berbangga diri dengan hasil itu. Apalagi data-data prestasi tersebut hanyalah direpresentasikan oleh angka-angka yang tidak seharusnya diterima secara mentah-mentah. Hal ini menjadi wajar apabila kita melihat kenyataan sehari-hari yang sepertinya tidak menunjukan *progress* berarti : *Yang dulu miskin sekarang masih tetap miskin*, sementara SBY dan jajaran pemerintah dengan berbangga memajang senyum atas pujian-pujian dari negara sahabat. Namun ada baiknya juga untuk memakai data-data statistikal tentang prestasi ekonomi Indonesia tahun 2006. Karena setidaknya data itu merupakan data tentang kondisi makro dari perekonomian Indonesia. Ketika berbicara tentang negeri ini, dengan berbagai elemen masyarakat sampai pada kesimpulan bahwa semua elemen masyarakat belum merasa pemerintah sudah berada pada *track* seperti yang diinginkan masyarakat.

Bangsa ini belum mendapatkan jati diri terbukti setiap berganti rezim berganti pula alur kebijakan, sehingga rakyat pun sulit untuk mempercayakan dukungannya. Arah reformasi belum sampai pada bentuk yang sesungguhnya, membuktikan bahwa pemerintahlah yang sepertinya lemah. Memang ini tanggung jawab kita semua, namun semestinya pemerintah harus lebih jelas perannya sebagai pemegang mandat untuk mampu menciptakan iklim yang bisa membawa bangsa ini kepada kemajuan yang berarti. Perekonomian merupakan salah satu indikator utama berhasil tidaknya suatu pemerintah dalam memberi kesejahteraan rakyatnya. Salah satu implementasinya adalah melalui kebijakan-kebijakan perekonomian yang merupakan cerminan dari sistem perekonomian yang dipakai suatu negara. Pemimpin tapi masih belum bisa dilihat konstruksi bangunan yang kokoh. Langkah yang ada masih merupakan tambal sulam, masih merupakan peredam-peredam yang bersifat sementara.

Apabila secara makro pemerintah mendapatkan *applause* (kenaikan kinerja pasar saham yang diindikasikan dengan Bursa Efek Jakarta yang mencapai angka 1800 serta perkembangannya tahun lalu terbaik ketiga di dunia adalah salah satunya), maka yang perlu menjadi pertanyaan adalah mengapa kondisi di lapangan (mikro ekonomi) seakan-akan menodai nilai bagus raport pemerintah. Pemerintah seharusnya mampu melakukan re-evaluasi kebijakan-kebijakan mereka, agar mereka bisa mendapatkan "angka" obyektif mengenai realitas di lapangan. Dengan demikian tidak akan terjadi suatu kondisi dimana ketimpangan ekonomi yang besar membuat data-data statistikal tadi menjadi bermasalah. Jadi sebenarnya yang harus menjadi pemikiran kita adalah bagaimana menggunakan prestasi ekonomi makro tersebut untuk mem-*boost* ekonomi mikro yang notabene justru berdampak langsung bagi penghidupan rakyat.

Jawa Timur merupakan pusat perekonomian sekaligus gerbang bagi pengembangan ekonomi di Indonesia Timur. Di Surabaya sendiri, mal-mal bermunculan seakan-akan para investor ingin membeli habis lahan Surabaya untuk dijadikan pusat perbelanjaan. Namun demikian, di tengah

berkembangnya wilayah Jawa Timur, pemandangan-pemandangan kumuh masih kerap kita temui mulai dari daerah-daerah pinggiran, bahkan sampai kota besar seperti Surabaya. Sungguh ironis apabila di satu sisi kita melihat perkembangan pesat, sementara tak jauh dari situ, kemiskinan masih melanda rakyat jelata.

Belum tuntas pemerintah menyelesaikan permasalah ini, bertubi-tubi bencana menyerang Jawa Timur. Mulai bencana alam sampai bencana sosio-ekonomi. Mulai lumpur Lapindo, Virus Flu Burung, sampai bencana "kenaikan harga beras". Hal ini tentu akan mempengaruhi perekonomian di Jawa Timur. Tidak hanya rakyat kecil, pengusaha pun terkena imbasnya. Pada kasus Lapindo, penduduk sekitar semburan lumpur terpaksa harus mengungsi, sehingga perekonomian lokal *mandeg*. Macetnya ruas jalan di Porong tentu akan menyebabkan inefisiensi biaya transportasi. Flu burung menyebabkan harga ayam turun jauh, sehingga pedagang ayam kebingungan. Kenaikan harga beras membuat rakyat kecil mengalokasikan lebih uangnya untuk membeli makanan, sehingga jatah yang lainnya seperti pendidikan dikurangi.

Kemiskinan muncul dimana-mana. Belum lagi bencana kelaparan yang tentu sangat ironis terjadi di negara yang kekayaan sumber daya alamnya terbesar nomer dua di dunia setelah Brasil (*Megadiversity : Earth's Biologically Wealthiest Nation, 1997)*. Ironi inilah yang disebut juga *Dutch Disease*, istilah untuk menggambarkan keadaan ironis negara yang kaya SDA, tapi justru miskin oleh karena warisannya itu. Menurut data LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) Universitas Indonesia, sebelum krisis ekonomi., jumlah orang miskin cuma 15% dari total penduduk. Di puncak krisis tahun 1999 membengkak jadi 24%. Jika dihitung dengan dengan standart hidup pendapatan 2 US Dollar (sekitar Rp.18.000) perhari, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia yang pendapatannya di bawah 2 US Dollar mencapai 49%, atau hampir separuh penduduk Indonesia menurut standar pendapatan tersebut adalah miskin !!!

Angka kemiskinan tersebut semakin tampak jelas apabila kita melihat keadaan di sekitar kita. Banyak orang yang berdesak-desakan untuk mendapatkan beras OP (Operasi Pasar) yang kualitasnya pas-pasan ataupun antri BBM yang terkadang "lenyap" dari peredaran mengingatkan kita akan jaman *opa-oma* kita tahun 1960-an dulu. Belum lagi jika melihat media yang gencar memperlihatkan saudara-saudara sebangsa kita yang sedang makan nasi karak, jagung, umbi-umbian, bahkan katul yang notabene merupakan makanan ayam sebagai pengganti nasi.

Akibat dari kemiskinan sangat banyak sekali, akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan akan semakin sulit di dapat. Wabah busung lapar dimana-mana dan terungkapnya kasus kelaparan yang menewaskan 55 orang di Yahukimo awal tahun 2005 menyadarkan kita bahwa bisa saja muncul generasi-generasi hilang (*lost generation*) dari Republik Indonesia.

Tahun 2000 menurut perkiraan *The World Food Council*, penderita kelaparan kronis di dunia mencapai satu miliar orang. Yang mati tiap tahun 13-18 juta manusia. Artinya setiap 24 jam ada 35 ribu orang meninggal dan setiap menitnya 24 orang, 18 diantaranya anak-anak. Menurut perkiraan *The Hunger Project*, 50% dari orang yang menderita kelaparan terkonsentrasi hanya di lima negara : Bangladesh, India, Nigeria, Pakistan dan Indonesia.

Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi tantangan Indonesia dan terutama Jawa Timur di dalam menghadapi tahun 2007 yang menunggu di depan. Alternatif kebijakan yang ditawarkan para pakar dan ahli bermacam-macam, yang cukup menarik perhatian saat ini adalah munculnya Ekonomi Syariah sebagai salah satu alternatif sistem ekonomi untuk meningkatkan perekonomian rakyat berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Alternatif lain muncul saat Muhamad Yunus mengejutkan dunia dengan penganugerahan dirinya sebagai nobelis perdamaian. Dengan konsep ekonominya yang menghargai rakyat miskin, dan bukan mengasihani, mampu mengangkat perekonomian jutaan rakyat miskin di Bangladesh. Yunus, dengan Grameen Bank-nya memutar-balikkan konsep 5 C (*Capacity, Character, Credit, Collateral, Cash-Flow*) yang selama ini menjadi pedoman bank-bank di dunia dalam memberikan pinjaman dana. Grameen menganggap rakyat miskin sebagai seorang nasabah yang dapat dipercaya kendati situasi dan kondisinya yang serba kekurangan. Inilah konsep-konsep yang diwacanakan di tanah air.

Satu hal yang paling mendasar dalam pertimbangan panitia untuk mengangkat tema "**Prospek Ekonomi Kerakyatan Jawa Timur 2007**" adalah minimnya peran Gereja. Melalui Sarasehan ini, Perhimpunan Pustaka Lewi ingin mengingatkan (bahkan mencoba menyadarkan) kembali kepada Gereja bahwa "ada sesuatu diluar sana" yang membutuhkan peran serta Gereja untuk mengatasinya. Banyak hal yang kurang mendapat perhatian dari Gereja, namun kami memilih "ekonomi" sebagai bidang pembahasan sarasehan kali ini.

Berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh umat agama lain di Indonesia mengenai masalah perekonomian ini, langkah yang diambil oleh Umat Kristen Indonesia, terutama Gereja boleh dikatakan ketinggalan. Umat Katolik Indonesia menjadikan masalah ekonomi ini sebagai salah satu perhatian utamanya. Seperti yang terungkap Pesan pastoral para Uskup se-Indonesia pada sidang Konferensi Wali Indonesia (KWI) tahun 2006 dengan tema "Habitus Baru : **Ekonomi yang Berkeadilan**", Keadilan bagi Semua : Pendekatan Sosio-Ekonomi. Dengan mempelajari dan mengusahakan kegiatan sosio-ekonomi diharapkan Umat Katolik Indonesia mampu mengusahakan ekonomi yang berkeadilan.

Sementara itu umat Islam sebagai umat mayoritas di negeri ini di sebagian sektor perekonomian telah melangkah jauh dengan sistem ekonomi Syariah. Sistem ekonomi Syariah telah berkembang bukan hanya dalam bidang perbankan, tapi juga asuransi, sistem perkreditan, yang telah terbukti banyak membantu pengembangan perekonomian mikro.

Kitab Yeremia 29 : 7 jelas mengatakan bahwa kita, umat Kristen, Gereja, harus mengupayakan kesejahteraan kota dimana kita ditempatkan (dibuang). Namun pada kenyataannya, ayat itu nampaknya hanya berakhir di mimbar-mimbar khotbah saja, implementasinya kurang! Sementara gereja-gereja yang lain yang menyadari tugas dan panggilan tersebut mengalami kekurangan modal dan informasi, sehingga yang mereka lakukan juga kurang efektif dan efisien.

Jadi secara keseluruhan, sarasehan ini berusaha memicu (kalau bukan memprovokasi) Gereja untuk terjun ke masyarakat dan turut berupaya mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dengan berpedoman dan berpelitakan Firman Allah (Mazmur 119 : 105). Dengan demikian, Gereja tidak akan lagi menegaskan eksistensinya di tengah masyarakat, namun lebih menegaskan integritasnya di dalam masyarakat.

Rumusan Rekomendasi Hasil Diskusi

Kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya Jawa Timur, terutama di sektor mikro sebenarnya menyisakan keprihatinan di tengah masyarakat konsumtif, hedonis, dan individualis yang saat ini semakin populer. Mulai dari media cetak, sampai media elektronik ikut menjadi agen terdepan dalam menyuntikkan hal-hal tersebut ke pikiran kita, Rakyat Indonesia. Padahal kondisi saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang lainnya sedang dalam kesusahan. Hal ini seharusnya mengganggu pikiran kita yang sudah enak.

Kesejahteraan rakyat (bukan sebagian rakyat) sebagai indikator utama keberhasilan pemerintah tampak belum dipahami betul oleh pemerintah. Data dari *United Nation Development Program* (UNDP) tahun 2005 yang mengukur standart hidup dari *Human Development Index* (HDI) menempatkan Indonesia di urutan 150 dari 177 negara. Sedangkan untuk Jawa Timur sendiri berada di urutan 25 dari 33 propinsi. Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan kita, mengingat indikator dari HDI ini merupakan pemenuhan kebutuhan dasar dari manusia seperti angka harapan hidup, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih, tingkat buta huruf, angka kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya.

Program Bantuan langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin pun dilancarkan pemerintah dengan segala kontroversinya, tapi itu juga tidak banyak membantu. Mulai bulan April 2007, BPS akan melakukan uji coba penyaluran dana Program Keluarga Harapan sebagai pengganti BLT. Tahun 2007 ini dianggarkan 40 triliun rupiah untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran yang sekarang telah mencapai 10, 9 juta jiwa.

Peran Gereja sebagai institusi yang menjadi garda depan dalam membentuk moral umat kristiani sebenarnya kurang begitu dapat dilihat. Selama ini fokus utama kegiatan-kegiatan Gereja selalu hanya terpusat pada kegiatan-kegiatan yang "surgawi dan alkitabiah" dan dengan bersamaan meminggirkan hal-hal "duniawi". Kegiatan-kegiatan di bidang sosial sebagian besar hanya terwujud dalam kegiatan "Bakti Sosial". Padahal, perlu lebih dari sekedar kegiatan-kegiatan yang bersifat responsif dan monumental seperti kegiatan-kegiatan bakti sosial. Dengan melakukan hal-hal tersebut, sebenarnya gereja hanya hanya menegaskan eksistensi-nya di tengah-tengah masyarakat bahwa "gereja itu ada". Padahal yang diperlukan adalah integrasi gereja dalam kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain, Gereja harus ikut dalam pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Proses integrasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai hal. Gereja harus dapat mempersiapkan intelektual-intelektual yang sudah "siap tempur" di kehidupan bermasyarakat. Janganlah gereja mematikan potensi-potensi intelektual di gereja dengan menggiring ke kegiatan-kegiatan gereja yang *bejibun* banyaknya. Gereja seharusnya mampu menyemangati umat kristiani untuk terlibat langsung dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang ekonomi, apabila Gereja ingin dapat berperan lebih dari yang telah dilakukan selama ini, Kita tidak harus selalu tergantung atau menggantungkan diri kepada pemerintah mengingat beban berat yang telah mereka pikul dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Gereja harus mampu menjadi *stake-holder*. Untuk itu diperlukan strategi agar dapat efektif dan efisien. Diantaranya membangun sinergi/jaringan di kalangan umat kristiani, lembaga-lembaga kristiani baik dari dalam maupun luar negeri sehingga potensi-potensi umat yang terpencar-pencar tersebut bisa dikonsolidasikan.

Selain itu gerak cepat gereja juga diperlukan, mengingat biaya yang diperlukan sebenarnya tidaklah banyak. Atau kalau perlu, Gereja-gereja di Indonesia juga bisa mengembangkan teologi kontekstual berdasarkan keadaan bangsa kita, seperti yang terjadi di Amerika Latin dengan Teologi Pembebasan-nya, Thailand dengan *Water Buffalo Theology* atau di Korea Selatan dengan Teologi Minjung yang pada intinya merupakan suatu jawaban terhadap persoalan kemiskinan dan ketidakadilan perekonomian di sana.

Di tengah keadaan sesulit apapun tentu masih ada suatu harapan akan janji penyertaan dan pemeliharaan (providensia) Tuhan yang terus kita pegang. Demikian juga dalam perekonomian khususnya di wilayah Jawa Timur masih ada titik-titik terang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita bisa ikut serta membangunnya.

Sektor UKM (Usaha Kecil & Menengah) sebagai ujung tombak utama pemberdayaan masyarakat adalah salah satunya. Dalam konteks Jawa Timur, Surabaya pada khususnya, pemberdayaan masyarakat miskin kota (pemulung, pedagang kaki lima, pekerja sektor informal) sebenarnya merupakan ladang pencarian nafkah hidup yang selama ini tidak mampu disediakan oleh pemerintah. Keberadaan mereka bukan untuk dimusuhi atau digusur secara semena-mena tanpa solusi yang jelas, tapi untuk dibina dan diarahkan untuk mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Hal inilah yang selama ini belum diberdayakan secara optimal. Jumlah industri kecil yang mencapai 90% hanya menyumbang sekitar 20% PDB. Keadaan ini tentu bisa lebih kita berdayakan.

Mengenai keberadaan Ekonomi Syariah sebagai suatu konsep alternatif, seharusnya ini tidak menjadi suatu ancaman bagi eksistensi Kristen. Namun sebaliknya, seharusnya ini menjadi tantangan bagi Gereja untuk lebih aktif lagi dalam mengintegrasikan diri di kehidupan bermasyarakat. Di sini proses integrasi kita sebagai suatu bangsa dan negara lebih ditonjolkan peranannya daripada menonjolkan eksistensi kita sebagai suatu identitas tersendiri. Ketakutan akan ancaman penerapan syariah Islam yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa juga harus kita sikapi secara hati-hati. Jangan sampai merusak hubungan kita dengan umat beragama lain yang akhirnya akan merusak tatanan persatuan ada kesatuan bangsa. Seperti ada tertulis; *"hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati."*